

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor DPA : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 101,730,000.00

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PELAKSANAAN KOORDINASI DIBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN DI DAERAH TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi setiap golongan antar umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Di tengah kemajemukan masyarakat dalam perbedaan keyakinan agama ternyata mampu membangun sikap untuk saling menghormati antar pemeluk agama.

Dengan demikian dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan kerukunan umat beragama dan situasi serta situasi di daerah dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6806);
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Barat;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019.
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 10. DPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, ini adalah dalam rangka melaksanakan koordinasi kerukunan umat beragama dan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Barat serta melakukan pemantauan perkembangan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar perkembangan situasi dan kondisi kerukunan umat beragama di Sumatera Barat dapat terjalin dengan harmonis serta toleransi antar dan inter umat beragama dapat terjaga dengan baik dan aman.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dalam mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan antar dan inter pemeluk agama, sekaligus memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk menjalankan agamanya masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah ini adalah :

1. Melaksanakan Rakor Tim FKUB Provinsi Sumatera Barat.
2. Forum Pemantapan Kerukunan Umat Beragama
3. Rakor Tim Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
4. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan perkembangan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, adalah dengan melaksanakan koordinasi dan pemantauan situasi dan kondisi daerah berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

D. TIM KOORDINASI

Dalam rangka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, maka dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan unsur perguruan tinggi, dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Tahun 2025 didukung dengan dana sebesar Rp. 101.730.000,- (Seratus Satu Juta Tujuhratus Tigapuluh Ribu Rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Yang akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP

1. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah.
2. Setelah selesai kegiatan maka, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengguna Anggaran



Adi Dharma, S.Sos
NIP. 19681016 198903 1 003

Padang, Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Muzahar, S.Sos, M.Si
NIP. 19681122 199009 1 002